

SPOTLIGHT ON

Aspek 'Jender' Semasa Krisis Gender Dimensions of the Crisis

If we take time to leaf through the previous five editions of the SMERU Newsletter, it will become apparent how little we have revealed of one of the most important aspects of the crisis, its gender dimension. We are all aware of how important this aspect really is and frequently discuss it. In fact we live with it; yet, we frequently forget to include it in our agenda. Gender is not just a matter of women, or even a matter of men and women. It is far more than that, for gender is a matter of human rights; gender is a development issue. In this edition we focus on the gender dimension of a range of crisis-related issues. Within our space limitations, we present first an overview of why gender is important in economics, in development, in evaluating the impact of the crisis, and ultimately, in overcoming the crisis. We then give a large part of our space to a number of organizations in order to share with readers a wide range of perspectives on gender and the crisis. One of the many NGOs that focuses on women's development has related some of its experiences and expressed the belief that the delivery of programs, including SSN and aid programs, would be more effective if these were carried out by women. One gender expert has also revealed that although women and girls have experienced the impact of the crisis they have not always obtained a fair share of the benefits from these aid programs.

The crisis that is presently overwhelming Indonesia, according to a member of the National Commission on Violence Against Women, is often narrowly-defined as an

'economic' crisis. In order to understand its root causes, its broad impact and its implications, it is necessary to appreciate fully the political and social dimensions of the crisis. This includes what has happened to women in Ambon and Sambas, the rape of Chinese Indonesian women in May last year, and evidence of increasing violence within the family directed against women.

In fact, the findings from the field reveal that there still are significant differences between women and men, both in the ways they have been affected by the crisis and the ways they are coping with its impact. This is apparent in our From the Field column which looks at women factory workers. We also see that the women's movement in Indonesia has strengthened its voice during the reformation era. Women have

Apabila kita sempatkan membuka-buka kembali Newsletter SMERU lima edisi terdahulu, kita diingatkan betapa sedikitnya kita mengungkap salah satu aspek yang teramat penting, yaitu aspek 'jender'. Seringkali kita menyadari betapa penting sebenarnya aspek ini dan kerap membicarakannya. Nyatanya kita hidup dengannya, namun kadang kita lupa untuk memasukkan dalam agenda kita. 'Jender', tidak hanya masalah perempuan, atau masalah laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, 'jender' adalah masalah hak manusia - 'jender' adalah masalah pembangunan. Pada edisi kali ini kami mengungkap secara khusus dimensi 'jender' dilihat dari berbagai persoalan yang berkaitan dengan krisis. Dengan keterbatasan tempat yang tersedia, pertama-tama kami menampilkan ulasan singkat mengapa 'jender' sangat penting dalam ekonomi, dalam pembangunan, dalam mengevaluasi dampak krisis, dan pada akhirnya, dalam mengatasi krisis itu sendiri. Kami juga menyediakan tempat yang cukup luas untuk berbagai organisasi agar kami dapat berbagi pandangan mengenai 'jender' dan krisis dengan para pembaca. Satu di antara banyak lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan diri pada pengembangan perempuan menceritakan pengalaman dan keyakinan bahwa penyampaian program, termasuk program bantuan akan lebih efektif apabila melalui perempuan. Hal ini juga diungkapkan oleh seorang ahli 'jender' bahwa perempuan dan gadis muda ikut mengalami dampak krisis tetapi mereka tidak selalu memperoleh manfaat dari program.

Krisis yang kini menimpa bangsa Indonesia, menurut salah seorang anggota komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan seringkali diterjemahkan agak sempit, yaitu krisis ekonomi. Menurutnya, guna memahami krisis yang menimpa secara luas dan mendasar, perlu dikaitkan dengan krisis politik dan sosial. Termasuk apa yang telah menimpa perempuan di Ambon dan Sambas, perkosaan terhadap perempuan Indonesia etnis Cina bulan Mei tahun lalu, dan bukti meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

Hasil dari lapangan ternyata masih memperlihatkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, baik sebagai penerima dampak krisis maupun bagaimana cara mereka menyalasi krisis. Kita akan menemukannya pada kolom 'From the Field' yang menyoroti buruh pabrik perempuan. Kita juga melihat

become increasingly bolder in demanding their rights, beginning with their path-breaking demonstration for lower milk prices. But while women are clearly becoming more active participants, "Invisible Women" illustrates that it is too early to congratulate ourselves: when women were directly approached and encouraged to take part in a community forum developed by the SMERU Team in Kamal Muara - North Jakarta, only 9 women attended out of a total of 54 participants. We end the issue with new data from the Indonesian Family Life Survey about the gender differences in how people are responding to the crisis.

One heartening fact is that more and more people are discussing gender issues and seem to understand them better. We at SMERU are very aware of this new perspective and recognize that it has affected our not only our research agenda but the way we work. Although we have about equal numbers of men and women in our team, we are not just concerned about statistics -- but also about qualifications, the capacities and responsibilities that are not based upon gender, without forgetting the special characteristics and skills of both women and men. Happy reading! ■ SKR, JM

bahwa pergerakan perempuan Indonesia semakin menggema pada era reformasi. Perempuan semakin berani menyuarakan haknya, berawal dari demonstrasi menuntut turunnya harga susu. Akan tetapi ketika perempuan semakin berpartisipasi aktif, 'Di Mana Perempuan' mengilustrasikan bahwa kenyataannya masih terlalu pagi untuk berbangga hati: sewaktu perempuan didekati dan didorong untuk ambil bagian dalam forum kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Tim SMERU di Kamal Muara - Jakarta Utara, hanya 9 perempuan yang hadir dari total 54 peserta. Kami mengakhiri edisi ini dengan data terkini dari Survei Kehidupan Keluarga Indonesia tentang bagaimana menghadapi krisis dilihat dari perbedaan 'jender'.

Hal yang menggembirakan adalah semakin banyak orang membicarakan 'jender' dan memahaminya. SMERU pun tampaknya tidak dapat menghindar untuk lebih banyak mengungkap fakta dan menerapkannya dalam hidup keseharian anggotanya. Dengan jumlah perempuan separuh dari keseluruhan anggota, kami tidak hanya peduli tentang jumlah, tetapi juga kualifikasi - hak dan kewajiban yang tidak dibedakan atas dasar perempuan atau laki-laki - walau tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan ataupun laki-laki. Selamat membaca ! ■ SKR, JM

Mengapa Jender ? Why Gender ?

Gillian Brown

[Ahli 'Jender' Bank Dunia untuk Asia Timur dan Wilayah Pasifik]
[The World Bank's Gender Coordinator for East Asia and Pacific Region]

Why is gender important in development? Because it improves equality and efficiency. Gender equality is, according to the Beijing Platform of Action, a matter of human rights. A gender approach to development helps to ensure quality in three ways: first by ensuring that the benefits of development are equally shared by men and women; second, by ensuring that the different issues faced by men and women are addressed in the course of development; and finally by ensuring that the negative impacts of development are not borne disproportionately by either men or women.

In terms of efficiency, the World Bank's Chief Economist recently pointed out that gender inequalities give rise to inefficiencies that negatively impact on growth and development. Or put more simply, taking a gender approach improves economic growth. There is also ample evidence that a gender approach improves the efficiency and effectiveness of development projects.

Putting this in the context of the East Asia crisis means studying the gender dimensions of the crisis, and including the findings in the development of both short-term safety nets and longer-term strategies for recovery. Only by doing this can we ensure that the issues facing men and women are both addressed in the design of the programs; that both men and women are equally share the benefits of recovery programs; and that neither will disproportionately bear negative impacts of long term policies and decisions.

The gender impacts of the crisis are complex and heterogeneous. There has not been a significant widening of gender gaps as had been feared at the start of the crisis, but this is not to say that there are not areas where women or girls have paid a heavy piece. For example, there are indications that women's nutrition in low urban income communities had deteriorated; and that girl's enrollment in junior secondary education has decreased significantly in some urban areas. However, there are other places, for example south Sulawesi, where enrollment of girls in junior secondary education has increased more than that of boys. Women as well as men have faced mass redundancies in the manufacturing sector; however, the percentage increase in the number of women in the workforce in 1998 compared to 1997 is

Mengapa 'jender' penting dalam pembangunan? Karena 'jender' memperbaiki persamaan hak dan efisiensi. Persamaan hak dalam 'jender', berdasarkan Beijing Platform of Action, adalah masalah hak manusia. Pendekatan 'jender' dalam pembangunan membantu kepastian persamaan hak melalui tiga hal: pertama memberikan kepastian bahwa manfaat pembangunan akan sama bagi laki-laki dan perempuan; kedua, memberikan kepastian bahwa terdapat perbedaan permasalahan, dan terakhir memberikan kepastian bahwa dampak negatif pembangunan tidak dialami secara tidak proporsional oleh laki-laki atau perempuan.

Berkaitan dengan efisiensi, Kepala Bidang Ekonomi Bank Dunia baru-baru ini menyatakan bahwa ketidaksamaan hak 'jender' menyebabkan ketidakefisienan yang memberikan dampak negatif pada pertumbuhan dan pembangunan. Dengan kata sederhana, pendekatan 'jender' meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa bukti nyata bahwa pendekatan melalui 'jender' meningkatkan efisiensi dan efektifitas proyek pembangunan.

Ambil contoh di Asia Timur, krisis berarti mempelajari dimensi 'jender' dari krisis, dan mencantumkan hasil temuan tersebut dalam pembangunan, baik jangka pendek seperti Jaring Pengaman Sosial dan strategi untuk jangka yang lebih panjang yaitu saat pemulihan. Hanya dengan ini kita dapat memastikan bahwa laki-laki dan perempuan akan saling berbagi manfaat dalam program pemulihan; dan tidak satupun yang mengalami dampak negatif secara tidak proporsional dalam keputusan dan kebijakan jangka panjang.

Dampak krisis terhadap 'jender' sangat kompleks dan heterogen. Belum ada perubahan yang nyata terhadap perbedaan 'jender' seperti yang ditakutkan terjadi di awal krisis, walaupun bukan berarti tidak ada perempuan dan gadis belia yang telah membayar akibatnya dengan harga yang mahal. Sebagai contoh, terdapat indikasi bahwa gizi perempuan pada masyarakat miskin di perkotaan sangat menurun; dan siswi yang mendaftar di sekolah menengah berkurang secara nyata di daerah perkotaan. Meskipun demikian, di beberapa wilayah lain, sebagai contoh Sulawesi Selatan, jumlah siswi yang mendaftar di

4.2%, which is higher than the 2.7% increase in the number of men. In some factories men and older women have been laid off while younger women are being recruited in their place; and some studies have shown that women's wage have decreased more than men's real terms.

Understanding the complexities presents a new challenge. Aggregate data can sometimes hide deeper changes that have lasting impacts on people's lives. Whether they have felt negative impacts or positive ones, few people's lives have remained untouched. Many families will have experienced changes that have altered the role each member plays, and the relationships they have with each other; children have been forced to leave school, men have become unemployed, consumption patterns have changed, mothers have helped to generate income for the first time. These changes in people's live challenge long standing assumptions about cultural and gender roles and relations. Sometimes this results in increased tensions within the household. In Indonesia, as in the other crisis-hit countries in East Asia, the increase in the number of calls to crisis centers, and the first-hand experiences of grass-roots organizations, points to an increase in the incidence of domestic violence.

Not all of the changes are negative: since the crisis began, Indonesian women have mobilized and succeeded in making their voices heard. It was women who first took the streets of Jakarta in protest against rising milk prices in February 1998, organized by Suara Ibu Peduli. The women's Coalition for Justice and Democracy was formed shortly before Soeharto stepped down and six months later organized the women's congress in which 500 women from 26 provinces participated. The role played by the women's chapter of Volunteers for Humanity in documenting the rapes of Chinese Indonesian women provided by the impetus for the establishment by Presidential Decree of the national Commission of Violence against Women. From grass-roots organizations in the kampungs, to national organizations, women are taking their place in the public arena.

Gender aspects were covered only sporadically in the design and development of the early crisis response programs. In part this was due to the lack of quick turnaround information on the social impacts of the crisis including the different ways that the crisis has affected men and women. Also, the time constraints placed on the preparation of the programs meant that gender analysis has not routinely been included in their design. Subsequently, there has been some improvement in taking gender into consideration in developing some of the programs. But in general, women and girls have shared the impacts of the crisis but they have not always shared the benefits of the response programs.

sekolah menengah meningkat lebih dari jumlah siswa. Perempuan dan laki-laki menghadapi pemutusan hubungan kerja secara massal pada sektor manufaktur; meskipun demikian, persentase peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan pada tahun 1998 dibandingkan 1997 adalah 4.2%, yaitu lebih tinggi 2.7% dari peningkatan jumlah tenaga kerja laki-laki. Pada beberapa pabrik, laki-laki dan perempuan yang lebih tua telah di PHK sementara perempuan yang lebih muda diterima sebagai pekerja baru; dan beberapa studi menunjukkan bahwa upah riil perempuan menurun di bawah laki-laki.

Pemahaman tentang kompleksitas permasalahan merupakan suatu tantangan baru. Data agregat kadang-kadang dapat menyembunyikan dalamnya perubahan pada kehidupan manusia. Apakah mereka merasakan dampak negatif atau positif, beberapa kehidupan manusia tetap tidak tersentuh. Beberapa keluarga mengalami terjadinya pergeseran peran setiap anggota, dan hubungan yang mereka miliki satu dengan yang lain; anak-anak dipaksa untuk meninggalkan sekolah, laki-laki menjadi penganggur, pola konsumsi berubah, ibu-ibu membantu menghasilkan pendapatan keluarga untuk pertama kalinya. Perubahan ini memberikan tantangan terhadap asumsi yang telah lama ada yaitu budaya dan peran 'jender' serta hubungan keduanya. Kadang-kadang keduanya menghasilkan peningkatan tekanan dalam keluarga. Di Indonesia, seperti halnya negara yang terkena krisis di Asia Timur, meningkatnya jumlah permintaan pertolongan di posko krisis, dan pertolongan yang diberikan oleh organisasi basis memberikan gambaran peningkatan peristiwa kekerasan terhadap perempuan.

Tidak semua perubahan tersebut negatif: sejak krisis mulai, perempuan Indonesia telah memobilisasi dan berhasil menyuarakan kepentingannya. Perempuan adalah yang pertama turun ke jalan di Jakarta dan melakukan protes menentang kenaikan harga susu pada bulan Pebruari 1998, yang dilakukan Suara Ibu Peduli. Koalisi Perempuan untuk Keadilan dan Demokrasi dibentuk sesaat sebelum Soeharto turun dan enam bulan kemudian mengorganisasi kongres perempuan, di mana 500 perempuan dari 26 propinsi berpartisipasi. Peran yang dimainkan oleh Perempuan Relawan untuk Kemanusiaan dalam mendokumentasikan perkosaan terhadap perempuan Indonesia etnis Cina mendorong pembentukan Keputusan Presiden tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Dari organisasi basis di kampung-kampung, menjadi organisasi nasional, perempuan mengambil tempat di tengah masyarakat.

Aspek 'jender' hanya diungkap secara sporadis dalam desain dan pengembangan program di awal krisis. Hal ini karena terbatasnya informasi yang cepat tentang dampak sosial dari krisis, termasuk perbedaan akibat krisis terhadap laki-laki dan perempuan. Juga, kendala waktu pada persiapan program yang berarti analisa 'jender' belum secara rutin dimasukkan dalam desain. Selanjutnya, terdapat beberapa perbaikan dengan mempertimbangkan

masalah 'jender' dalam pengembangan beberapa program. Namun pada umumnya, perempuan dan anak-anak perempuan telah berbagi dampak krisis walau mereka tidak selalu menikmati manfaat program.

Gillian Brown was the gender specialist in the World Bank resident mission in Jakarta from 1996-1998. She has now moved to Washington after eight years in Indonesia, and is the World Bank's Gender Coordination for the East Asia and Pacific Region.

Gillian Brown adalah ahli 'jender' Bank Dunia di Jakarta pada tahun 1996-1998. Saat ini, ia telah pindah ke Washington, setelah delapan tahun di Indonesia, sebagai Koordinator 'jender' di Bank Dunia untuk Asia Timur dan Wilayah Pasifik.

Kekerasan Terhadap Perempuan Selama Krisis

Violence Against Women During the Crisis

Kamala Chandrakirana

[Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan]
[National Commission on Violence-Against Women]

In contrast to massive data collection efforts to identify and measure the economic impact of the crisis, there has been very little interest in how it has affected the incidence of violence against women in their homes, workplaces and in society at large. This reflects a long-standing bias about what we consider public concerns and what is, therefore, worthy of systematic documentation and measurement.

Information on the incidence of violence against women during the crisis period is sporadic and anecdotal. In spite of this, we are confident that there has been a significant increase. Several crisis centers in urban areas in Java have reported at least a doubling in the number of women victims of domestic violence who have come to seek help since the crisis began. Community-based women's groups have reported more tension and fighting in the family because of economic stress. Focus group discussions with women throughout the country indicate more conflict in the household, particularly in urban communities.

The increase in women seeking help from crisis centers reflects several phenomena at once: a real increase in the incidence of violence against women, more confidence among women who are the victims of violence to report their cases, and a growing awareness about the existence of crisis centers and an improved understanding of the services they provide. All these phenomena are, in fact, direct and indirect effects of the crisis. Aside from the psychological stress and subsequent vulnerability to domestic violence produced by economic hardship, women have become more aware of their rights and crisis centers have become more visible in the public eye ever since the tragedy that occurred at the peak of the crisis, namely the mass rape of Chinese Indonesian women.

Another phenomena that we believe to be an integral part of the crisis is the inter-ethnic and inter-religious conflicts which have occurred in various parts of the country during the last twelve months. Ambon and Sambas are two of the most prominent cases. Violence in Aceh and East Timor has also become part of the crisis condition that we are experiencing. The massive violence that has occurred in these areas has forced whole communities to leave their

Berbeda dengan upaya pengumpulan data secara besar-besaran dalam rangka mengidentifikasi dan memperkirakan dampak krisis ekonomi, sangat sedikit data yang menggambarkan bagaimana dampak terjadinya kekerasan terhadap wanita di rumah, di tempat kerja, maupun di masyarakat luas. Hal ini berkaitan dengan pemahaman yang selama ini kabur tentang apa yang kita anggap sebagai perhatian publik, sehingga di sini terlihat pentingnya perlunya dokumentasi dan perkiraan yang sistematis.

Informasi tentang kekerasan terhadap perempuan selama krisis masih bersifat sporadis dan anekdot. Walaupun demikian, kita sangat yakin adanya indikasi peningkatan yang nyata. Beberapa posko krisis di area perkotaan di Jawa melaporkan sedikitnya jumlah perempuan korban kekerasan dalam keluarga yang meminta uluran tangan telah meningkat dua kali sejak krisis menerpa. Kelompok komunitas perempuan melaporkan adanya peningkatan tekanan dan pertengkaran dalam keluarga yang disebabkan oleh tekanan ekonomi. Diskusi secara kelompok dengan perempuan di seluruh Indonesia mengindikasikan adanya peningkatan konflik dalam keluarga, terutama pada masyarakat perkotaan.

Peningkatan jumlah perempuan yang meminta pertolongan ke posko krisis mencerminkan beberapa fenomena secara bersamaan yaitu: peningkatan secara nyata terjadinya kekerasan terhadap wanita, di antara perempuan korban kekerasan ada yang sudah lebih berani melaporkan kasus mereka, dan meningkatnya pemahaman tentang keberadaan posko krisis dan pelayanan yang disediakan. Seluruh fenomena tersebut, pada kenyataannya, merupakan dampak krisis, baik langsung maupun tidak langsung. Di samping tekanan psikologi dan kerentanan akibat kekerasan dalam rumah tangga karena kesulitan ekonomi, perempuan menjadi semakin sadar tentang hak-haknya, dan posko krisis menjadi lebih terlihat oleh masyarakat setelah tragedi yang terjadi pada puncak krisis, sebut saja perkosaan massal pada perempuan Indonesia etnis Cina.

Fenomena lain yang kita percayai sebagai bagian integral dari krisis adalah konflik antar etnis dan antar agama yang terjadi di beberapa tempat di negara ini selama 12 bulan terakhir. Ambon dan Sambas, adalah dua di antara kasus yang sangat menonjol.

homes and seek refuge in makeshift locations. The number of internally displaced persons in areas of conflict has reached the tens of thousands. Large numbers are women, children and the elderly.

These people have undergone not only psychological trauma from witnessing violent acts directed at themselves, their family members and their neighbors, but they are also facing continual stress in poorly-equipped and poorly-managed refugee camps. Many of them feel no sense of security and safety, as they continue to face violence or the threat of violence from their surroundings. Cases of violence against women have been noted in several of these camps. The reported incidents include physical and verbal aggression by husbands against their wives for being unable to provide for all the needs of their families as well as varying degrees of sexual abuse towards women and girls.

Indeed, the social face of the crisis has been too often ignored. The crisis is not just about the loss of jobs and income for the labor force – a narrowly-defined 'economic' crisis. In order to better understand its root causes, its broad impact and the implications these may have for reconstruction, it is necessary to fully appreciate the political and social dimensions of the crisis. This includes the breakdown of the social fabric and stress on the family unit. Among the most vulnerable people in these circumstances, because of the imbalanced nature of gender relations, are women and girls. The increased violence that women must face in their own homes and in their own communities bear witness to this.

Indonesian women are not standing still in the face of such realities. The National Commission of Violence against Women, for instance, is working in Ambon and Buton to develop counseling support to respond to the psychological stress and trauma that exist in the refugee camps. It has been campaigning on the need for neutrality and protection for humanitarian workers in the areas where political conflict is still occurring. The commission will also be facilitating the development of a witness/victim protection program for survivors of violence as well as documenting all forms of violence against women throughout Indonesia.

Kekerasan di Aceh dan Timor Timur juga menjadi bagian dari kondisi krisis yang kita hadapi. Kekerasan besar-besaran yang terjadi di area ini telah memaksa seluruh masyarakat meninggalkan rumah mereka dan mengharapkan tempat perlindungan di lokasi sementara. Jumlah pengungsi di Indonesia telah mendekati ratusan ribu orang. Kebanyakan adalah perempuan, anak-anak, dan orang yang sudah tua.

Mereka telah mengalami tidak hanya trauma psikis sebagai saksi kekerasan yang mereka alami sendiri, atau kekerasan terhadap anggota keluarga dan tetangganya, tetapi mereka juga menghadapi tekanan yang terus menerus di tempat perlindungan yang tidak memadai. Beberapa dari mereka merasa tidak aman karena terus-menerus menghadapi kekerasan atau perlakuan kasar dari sekitarnya. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dicatat di beberapa tempat pengungsian. Laporan kejadian termasuk serangan fisik dan lisan oleh suami terhadap para istri yang terjadi hanya karena ketidakmampuan untuk menyediakan kebutuhan anggota keluarga, termasuk beberapa tingkatan pelecehan seksual terhadap perempuan dan gadis usia belia.

Wajah krisis sosial yang sesungguhnya sering sekali dilupakan. Krisis - bukan hanya kehilangan pekerjaan dan penghasilan semata – yang disempitkan menjadi krisis 'ekonomi'. Dalam rangka memahami dengan lebih baik tentang akar permasalahan, dampak dan pengertian yang lebih luas bagi suatu perbaikan, sangat penting untuk memasukkan dimensi politik dan sosial dari krisis. Termasuk gangguan terhadap pranata sosial dan tekanan pada unit keluarga. Di antara orang yang paling rentan dalam situasi ini, karena ketidaksamaan hubungan jender, adalah perempuan dan gadis belia. Meningkatnya kekerasan yang dihadapi perempuan dalam rumah mereka sendiri dan dalam masyarakatnya sendiri adalah sebagai saksinya.

Perempuan Indonesia tidak hanya tinggal diam dalam menghadapi kenyataan ini. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, misalnya, bekerja di Ambon dan Buton untuk mengembangkan bantuan konsultasi dalam merespon tekanan trauma psikologi yang terjadi di tempat pengungsian. Perlunya netralitas dan perlindungan pekerja kemanusiaan di wilayah terjadinya konflik politik telah disebarluaskan. Komisi ini juga akan memfasilitasi pengembangan program perlindungan terhadap saksi/korban yang selamat dari kekerasan, termasuk mendokumentasikan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia.

For further information, please contact the National Commission on Violence Against Women, Jl. Latuharhari 4B, Jakarta 10310, contact phone no: 021-3925230, fax: 021-3925227 (temporary).

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jl. Latuharhari 4B, Jakarta 10310, telepon: 021-3925230, faks: 021-3925227 (sementara).

Pusat Pengembangan Sumberdaya WANITA The Human Resources Development Center for Women

- **Diskusi dengan Ketua Yayasan PPSW: Nani Zulminarni, dan staf program: Anik Dwi Martuti** ■
■ **Discussions with Ms. Nani Zulminarni: PPSW Chairperson, and Anik Dwi Martuti: Program Officer** ■

In this special "Gender" edition, SMERU would like to introduce The Human Resources Development Center for Women (PPSW), one of many self-help organizations working with women and grassroots communities to overcome economic, health and education problems.

PPSW was established as an executive body of the Annisa Foundation of Indonesia in 1986 by a group of people associated with the Agribusiness Development Center (PPA), a consultant institution in Jakarta. The Annisa Foundation was established for three reasons; firstly, PPA had always found it difficult to involve women in its programs; secondly, the donor agency was prepared to involve women in a program it was willing to finance, and thirdly, the women's movement was a prominent feature of that period.

PPSW attempted to find ways to empower women from the less privileged sections of society through activities in the informal sector. PPSW's real activity started with the formation of saving and loan groups and Income Generating Activities by providing counterparts for small businesses such as warungs, food vendors, petty traders, farming and livestock ventures.

Subsequently PPSW became an independent foundation in 1988. Its long term vision is to strengthen women and to transform their social status and their role in society through increased access and control of resources to create a more egalitarian society.

PPSW has chosen to concentrate on economic problems and the improvement of health and education as its entry points into organizing the community, especially women's groups.

With a staff of 21 women and 3 men, PPSW is operating in more than 50 villages in Metropolitan Jakarta, West Java, Riau, and West Kalimantan.

The prolonged economic crisis has had an adverse effect on those groups supported by PPSW. As of August 1998, 60% of the members of some of the women's groups had suffered a 20 - 50% decline in their businesses and 70% of saving and loan groups have experienced defaulting on loans. As a result,

Pada edisi khusus 'jender' kali ini, SMERU tertarik menampilkan satu LSM di antara banyak organisasi yang bekerja untuk kelompok perempuan dan masyarakat basis dalam mengatasi persoalan ekonomi, kesehatan dan pendidikan, yaitu Yayasan Pusat Pengembangan Swadaya Masyarakat atau Yayasan PPSW.

PPSW dibentuk sebagai badan pelaksana Yayasan Annisa Indonesia pada tahun 1986 oleh sekelompok individu yang sebagian merupakan pendiri Pusat Pengembangan Agribisnis (PPA) sebuah lembaga konsultan di Jakarta. Setidaknya ada tiga alasan Yayasan Annisa didirikan, yaitu pertama, PPA merasa mendapatkan kesulitan untuk melibatkan perempuan dalam menjalankan kegiatannya, kedua adanya komitmen lembaga donor untuk melibatkan perempuan pada setiap kegiatan yang didanainya, dan ketiga tahun tersebut berada dalam dekade perempuan.

Ketiga alasan tersebut memotivasi PPSW untuk memberdayakan perempuan yang kurang beruntung melalui kegiatan sektor informal. Kegiatan nyata yang dilakukan PPSW pada saat itu adalah membentuk kelompok simpan pinjam dan 'Income Generating Activity' (IGA) melalui pendampingan usaha kecil seperti warung, pembuatan makanan, pedagang kakilima, usaha pertanian, dan peternakan.

Sejak tahun 1998, PPSW menjadi lembaga yang mandiri lepas dari induknya Yayasan Annisa dengan nama Yayasan Pengembangan Sumberdaya Wanita atau Yayasan PPSW. Visi PPSW adalah pemberdayaan perempuan dan transformasi sosial bagi status dan peran perempuan dalam masyarakat melalui peningkatan akses dan kontrol perempuan terhadap sumberdaya dan yang tersedia dalam dirinya, guna menciptakan tatanan masyarakat yang lebih egaliter.

PPSW memilih berkonsentrasi pada masalah ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sebagai pintu masuk dalam pengorganisasian masyarakat khususnya kelompok-kelompok perempuan.

Dengan 21 staf perempuan dan 3 staf laki-laki, PPSW bekerja di lebih 50 desa di DKI-Jakarta, Jawa Barat, Riau dan Kalimantan Barat.

some members are short of food, their health has been affected and some of their children have had to quit school. Groups from the Jakarta and West Java areas together with PPSW have conducted a basic social analysis in an attempt to solve these problems.

In general this enquiry reached similar conclusions in every village: to overcome shortages of food and medicine the community should (i) use fallow and vacant land to produce foodstuffs and grow medicinal herbs, (ii) prepare traditional medicines, (iii) arrange the sale of cheap emergency essential foodstuffs, and (iv) require public health clinics to accept Health Cards and to function as Infant Health Centres. To overcome education problems, the Study Group assistance package (A,B and junior high school) needs to be put into operation.

To overcome the crisis-related problems faced by the groups they are supporting, PPSW has conducted a number of emergency programs. These have included the provision of cheap essential foodstuffs to about 2,400 households within Jabotabek, efforts to overcome education problems for 629 school children (primary, junior, and high) in four of the areas they are supporting (Jabotabek, Karawang, Sukabumi and Pandeglang), and funding for health treatment and medicine for those in the community who cannot afford to pay. The cheap essential foodstuffs is conducted in collaboration with YASSPUK (a women's small-scale business foundation) and with financial assistance from TDH (Terre Des Hommes), a donor agency from the Netherlands. Its education efforts have received financial assistance from TDH, YASALIRA, and ROESMA.

In conclusion, based on their experience, PPSW staffs believe that women are much more effective in delivering emergency assistance programs, especially since they have the primary responsibility for domestic matters such as food and education. As such women are especially sensitive to the requirements of families.

Although PPSW is a new contact, SMERU's strong impression is that its efforts have been carried out without noisy publicity, all for the benefit of the grassroots community through its women's groups. ■ HS

Akibat krisis yang berkepanjangan di Indonesia, kelompok binaan PPSW juga terkena imbasnya. Pada bulan Agustus 1998, 60% dari anggota kelompok usahanya menurun berkisar 20 -50%, dan 70% kelompok simpan pinjam menunggang hutang. Sebagai akibat lebih lanjut, mereka kekurangan pangan, kesehatan memburuk, dan anak-anak tidak dapat bersekolah. Untuk mengatasi hal ini kelompok binaan PPSW bersama PPSW di wilayah DKI dan Jawa barat mengadakan analisa sosial sederhana.

Secara umum analisa sosial sederhana di tiap-tiap desa memberikan hasil hampir sama: untuk mengatasi kekurangan pangan dan kesehatan, masyarakat harus (i) memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami tanaman pangan dan tanaman obat-obatan tradisional, (ii) membuat obat-obatan tradisional, (iii) mengadakan penjualan 'sembako' murah, (iv) meminta puskesmas untuk menerima Kartu Sehat dan mengaktifkan fungsi Posyandu. Untuk mengatasi masalah pendidikan, Kelompok belajar (kejar paket A, B dan SMP) perlu segera dilaksanakan.

Dalam rangka mengatasi dampak krisis yang menerpa kelompok binaannya, PPSW melakukan berbagai program darurat antara lain pengadaan sembako murah bekerjasama dengan YASSPUK (Yayasan Pendamping Perempuan Usaha Kecil) dan dukungan dana dari TDH (Terre Des Hommes) lembaga donor dari Belanda membantu sekitar 2,400 keluarga di Jabotabek, penanggulangan pendidikan dengan dukungan dana dari TDH, YASALIRA (Yayasan Lingkungan Sejahtera), dan ROESMA sehingga dapat membantu setidaknya sekitar 629 siswa (SD, SMP, dan SMU) di empat wilayah binaan yaitu Jabotabek, Karawang, Sukabumi, dan Pandeglang, serta membiayai ongkos berobat dan obat bagi masyarakat yang tidak dapat membayar.

Berdasarkan pengalaman mereka, staf PPSW percaya bahwa program penanggulangan krisis jauh lebih efektif jika disampaikan melalui perempuan, karena perempuan memang dikonstruksikan sebagai penanggung jawab dalam keluarga, sehingga mereka jauh lebih peka dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga.

Walau baru mengenal PPSW, kesan mendalam diperoleh SMERU atas jerih payah PPSW yang dilakukan tanpa publikasi yang hingar bingar, dan kesemuanya diperuntukkan bagi masyarakat basis melalui kelompok perempuan. ■ HS

For further details about PPSW, please contact Ms. Nani Zulminarni and Ms. Ani through the following address: Billy Moon H1, No. 10 Pondok Kelapa, Jakarta 13450. Phone: 021-8642134/8657945; Fax: 021-8642134, E-mail: ppsw@indo.net.id

Untuk mengetahui lebih banyak tentang Yayasan Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita dan kegiatannya, silakan hubungi Nani Zulminarni dan Anik Dwi Martuti dengan alamat Billy Moon H1, No. 10 Pondok Kelapa, Jakarta 13450. Telepon: 021-8642134/8657945, faks: 8642134, E-mail: ppsw@indo.net.id

Suara Ibu Peduli, Suara Dari Bawah

Suara Ibu Peduli, the Voice from Below

Gadis Arivia

One of the most committed women's organisations to emerge in response to the economic crisis has been Suara Ibu Peduli. This group has been involved in a range of community-based programs to assist women in need. We have invited one of the SIP activists, Gadis Arivia, to give a brief account of their activities so far.

Suara Ibu Peduli (The Voice of The Women Who Care, SIP) is a community-based group of women, who assist and design the programs in their particular area. Up to the present, SIP has seven branches in Jakarta and two recently established branches in the regions. In Jakarta there are SIP branches in Depok, Tanjung Priok, Rempoa, Rawamangun, Citayem, Cilandak, Bojong Gede and Kemanggisan Hilir, while in the regions there are SIP in Pontianak and Aceh. The SIP total membership at present is around 4,000.

SIP was established over a year ago, to be exact in February 1998 when a group of women was concerned about milk prices that had increased by 400%. At that time SIP was concentrating on providing cheap milk to children and pregnant women who needed a sound nutritional supplement. However, with the deterioration of the economic situation in Indonesia it became more and more difficult for both middle class and poorer families, so that the need for milk became a secondary priority. With the increasing number of lay-offs among the husbands of SIP members, the primary requirement of the household shifted in the direction of mere survival. The women of SIP then began to plan several of their own programs to meet their needs:

Emergency Food and Medical Centers

The Food Center activities are in the form of small shops (warsem) organised by the women where people can buy basic commodities. The ultimate aim of these shops is to introduce the concept of cooperatives as well as micro-credit systems which can be used by women to expand their activities.

The Emergency Medical Centres provide free medical treatment by a team of SIP volunteer doctors, who also supported the student demonstrations during May and November of last year. This team of doctors visits the branches of the SIP women on a regular basis, assisting with medical treatment and advice on

Salah satu organisasi perempuan yang paling prihatin akan akibat krisis adalah Suara Ibu Peduli. Kelompok ini telah berkecimpung dalam berbagai program kegiatan berbasis kemasyarakatan untuk membantu wanita yang membutuhkan. Kami telah mengundang salah satu aktivis SIP, Gadis Arivia, untuk memberikan penjelasan singkat mengenai aktivitas mereka selama ini.

Suara Ibu Peduli (SIP) adalah kelompok ibu-ibu yang berbasis di dalam lingkungan masyarakat (community based organization) yang membantu dan merancang sendiri program di masing-masing wilayah. Sampai saat ini, SIP mempunyai tujuh cabang di Jakarta dan dua di daerah yang sedang dalam pengembangan. Tujuh cabang di Jakarta tersebut adalah SIP Depok, SIP Tanjung Priok, SIP Rempoa, SIP Rawamangun, SIP Citayem, SIP Cilandak, SIP Bojong Gede dan SIP Kemanggisan Hilir. Sedangkan yang di wilayah lain adalah SIP Pontianak dan SIP Aceh. Seluruh anggota SIP sampai saat ini berjumlah sekitar 4,000 orang.

SIP berdiri sejak tahun lalu, tepatnya bulan Pebruari 1998 ketika sekelompok ibu-ibu prihatin akan kenaikan harga susu yang mencapai 400%. Saat itu SIP berkonsentrasi dalam pengadaan susu murah untuk anak-anak dan ibu-ibu hamil yang membutuhkan tambahan gizi yang baik. Namun, dalam perkembangannya keadaan ekonomi di Indonesia terasa semakin sulit bagi keluarga menengah ke bawah sehingga kebutuhan susu menjadi prioritas kedua. Dengan meningkatnya PHK di kalangan suami ibu-ibu SIP, kebutuhan utama rumahtangga bergeser ke arah pertahanan hidup (survival). Ibu-ibu SIP kemudian merancang berbagai programnya sendiri untuk kebutuhan mereka:

Posko Lumbung dan Medis

Kegiatan Posko Lumbung berupa warsem (warung sembako). Warsem yang dikelola oleh ibu-ibu menjual kebutuhan pokok. Tujuan akhir dari warsem ini adalah memperkenalkan konsep berkoperasi, bahkan juga memperkenalkan sistem mikrokredit yang dapat digunakan ibu-ibu untuk mengembangkan usaha.

Kegiatan Posko Medis adalah menyelenggarakan pengobatan gratis. Pengobatan diberikan oleh tim dokter relawan SIP, yang juga membantu aksi

health matters.

Study Program

These activities are directed at women by giving them training in first aid (P3K) and community organization. Hopefully these basic skills will provide them with sufficient knowledge to manage their own working groups. This has already been done on a small scale with the scholarship program where Elementary School candidates have been selected by the women themselves.

In addition to economic issues, other urgent social problems have emerged. The increase in the number of retrenchments among the husbands of SIP members has resulted in a growing problem of violence within the family. Counseling has been urgently required in every branch to deal with cases of domestic violence: this has been especially directed at men in order to understand the emotional and stress-related problems which they are facing and experiencing. The impact of the economic crisis on society is also evident in the form of youth prostitution, which has been noted in certain densely populated areas of Jakarta.

Of course the programs conducted by SIP with their limited funding cannot provide immediate solutions to these problems. Various observations in the field indicate that the conditions faced by the SIP women are complex. However, the reality is that the SIP women, from both middle class and lower class backgrounds, do care and want to improve the deteriorating economic and social conditions which are affecting the welfare of their families. This constitutes an immense achievement. These grassroots groups that are planning and determining their own programs and needs, and that are operating and controlling the organizations they themselves have formed, are the groups that are giving voice to the aspirations and interests of the grassroots of society.

mahasiswa pada peristiwa bulan Mei dan Nopember tahun lalu. Tim dokter ini secara teratur mengunjungi cabang-cabang ibu-ibu SIP, mereka membantu dengan pelayanan medis serta penyuluhan tentang kesehatan.

Program Belajar

Kegiatan Program Belajar ditujukan baik kepada ibu-ibu dengan memberikan pelatihan seperti P3K dan bimbingan organisasi masyarakat. Pembekalan dasar ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk mengelola kelompok kerja mereka. Sedangkan untuk program beasiswa telah dilakukan dalam skala kecil kepada siswa-siswa Sekolah Dasar di mana calon siswa diseleksi oleh ibu-ibu SIP sendiri.

Persoalan mendesak yang menguak disamping persoalan ekonomi adalah persoalan sosial. Meningkatnya PHK di kalangan suami ibu-ibu SIP mengakibatkan tumbuhnya masalah kekerasan dalam keluarga. Aktifitas konseling sangat dibutuhkan di setiap cabang untuk menangani kasus-kasus kekerasan domestik terutama yang ditujukan kepada laki-laki, agar mendapatkan pemahaman tentang persoalan emosi dan stres yang mereka hadapi dan rasakan. Krisis ekonomi yang berdampak pada krisis sosial juga ditemui dalam bentuk prostitusi belia, hal ini ditemukan di daerah padat di Jakarta.

Program-program yang dilakukan oleh SIP dengan keterbatasan biaya yang ada disadari tidak akan memecahkan persoalan secara instan. Dari berbagai pengamatan di lapangan, kondisi-kondisi yang dihadapi ibu-ibu SIP sangat multi-kompleks. Namun, kenyataan bahwa ibu-ibu SIP dari golongan kelas menengah ke bawah ini, peduli dan ingin memperbaiki keadaan kondisi ekonomi dan sosial yang semakin memburuk dan membawa dampak pada kesejahteraan keluarga mereka, adalah merupakan prestasi yang luar biasa. Kelompok-kelompok yang tumbuh dari bawah, yang merancang dan menentukan program dan kebutuhannya sendiri serta menjalankan sendiri organisasi yang mereka bentuk adalah kelompok yang menyuarakan aspirasi dan kepentingan dari bawah.

For more information, contact Gadis Arivia at SIP, phone: 021-3911230, fax: 021-31900663.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Gadis Arivia di SIP, telepon: 021-3911230, faks: 021-31900663.

Di Mana Perempuan ? The Invisible Women

Why do government community development programs rarely take women's interests into consideration? The answer can be found both in the communities themselves and in the external development agencies. In general, many men in the community still consider that women should only be involved in taking care of private matters within the household.

External development agencies such as the government and NGOs can also be blamed. At the level of design, most government development programs and many NGO programs do not give sufficient emphasis to the role of women. At the level of implementation, women do not have equal access to participate in programs, while information regarding opportunities in development programs is still monopolized by men.

Only 10% to 20% of the Kelurahan Forum personnel (staff and members of task forces) in Cibangkong, Bandung are women. This is in sharp contrast with the total number of women in the community - almost 60% of the local population. Similar conditions can also be found in the Kelurahan Forum established as part of SMERU's Community-based Monitoring pilot project in Kelurahan Kamal Muara, North Jakarta. The pilot projects in Gangga and Sekotong, Lombok Barat, are even worse. In those two rural locations, almost 100% of the personnel in the two Kecamatan Forums are men.

In such cases, external intervention can help. SMERU's Community-based Monitoring group decided to intervene when they were facilitating a community workshop in Kamal Muara. The workshop was organized to form the Kelurahan Forum and to elect its chairperson and staff.

Before May 13, the election of the chief of the Kelurahan Forum in Kamal Muara had already been repeated twice because it was considered unfair. Since the third meeting was crucial, the SMERU team decided to intervene within the community directly by visiting both the poorest people in the community and women, and inviting them to send representatives to the meeting. The move was to increase the degree of inclusiveness of the Kelurahan Forum in Kamal Muara. Seven newcomers came to the meeting to represent the poorest in the community. Among them, were five men and two women. Three additional women from local middle class backgrounds also came to the meeting.

Mengapa program-program pemerintah dalam pengembangan masyarakat jarang yang serius memperhatikan kepentingan perempuan? Jawabannya dapat digali dari dalam masyarakat sendiri, dan dari lembaga-lembaga pembangunan eksternal. Pada umumnya, kaum laki-laki dalam masyarakat masih banyak yang berpikir bahwa perempuan sebaiknya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Ada anggapan bahwa lingkup gerak perempuan lebih bersifat pribadi di dalam rumah.

Lembaga-lembaga pembangunan eksternal juga ikut bertanggung jawab. Pada tingkat pembuatan desain, kebanyakan program pembangunan pemerintah dan banyak program LSM tidak mengikutsertakan peran perempuan secara maksimal. Pada tingkat pelaksanaan, perempuan tidak memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam program. Sementara itu, informasi tentang peluang dalam program pembangunan dimonopoli kaum laki-laki.

Hanya sekitar 10% sampai 20% dari pengurus Forum Kelurahan dan anggota gugus tugas di Cibangkong, Bandung adalah perempuan. Hal itu bertentangan dengan jumlah perempuan dalam masyarakat tersebut yang hampir 60% dari total populasi lokal. Keadaan serupa juga ditemui di Kelurahan Forum di Kamal Muara, Jakarta Utara, yang pembentukannya difasilitasi oleh Tim Pemantauan Swadaya Masyarakat SMERU. Uji coba Pemantauan Swadaya Masyarakat di Kecamatan Gangga dan Sekotong, Lombok Barat bahkan lebih memprihatinkan lagi. Di dua Forum Kecamatan itu, hampir seluruh staf dan anggota gugus tugasnya laki-laki.

Pada beberapa kasus, intervensi dari luar dapat membantu. Tim Pemantauan Swadaya Masyarakat dari SMERU memutuskan untuk melakukan intervensi tersebut ketika sedang memfasilitasi penyelenggaraan lokakarya warga Kamal Muara dalam rangka pembentukan Forum Kelurahan dan pemilihan ketua serta pengurus.

Sebelum pertemuan tanggal 13 Mei 1999 pemilihan Ketua Forum Kelurahan Kamal Muara telah diulang sampai dua kali karena dianggap tidak jujur. Karena pertemuan ketiga untuk memilih ketua ini sangat penting, tim Pemantauan Swadaya Masyarakat SMERU memutuskan untuk melakukan intervensi, salah satunya adalah dengan cara mengunjungi kaum yang paling miskin di pedesaan dan kalangan perempuan, dan meminta mereka untuk mengirim wakil ke lokakarya warga. Intervensi tersebut

SMERU's external intervention, and the fact that many people considered the meeting crucial, led to the number of participants swelling to 54 people. Although in terms of the percentage the participation of women did not experience a significant increase, the absolute numbers almost doubled.

If invitations to join the community workshop on 13 May had been left totally in the hands of workshop organizers from the community, most of whom were men, the number of female participants would not have increased from 5 to 9. However, there is not much to be proud of. Only 9 out of 54 participants were women, and these women did not participate fully in the workshop. During the 13 May meeting, the floor nominated a female university student as one of the four candidates for the chair. But this was just a token gesture since she did not gain even a single vote. However, she was then appointed as the secretary of the Forum, and has been actively contributing to its day-to-day operations. This example shows that it is definitely necessary to set a certain quota for women's participation in community development projects. Such measures have already been put in place in some other programs including the Kecamatan Development Program. ■ DJ, AI

dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan Forum Kelurahan di Kamal Muara. Di antara mereka, lima orang adalah laki-laki dan dua perempuan. Tiga perempuan pendatang baru dari golongan menengah juga hadir dalam pertemuan.

Intervensi yang dilakukan oleh SMERU, dan pentingnya pemilihan ketua yang ketiga ini membuat jumlah peserta lokakarya meningkat menjadi 54 orang. Meskipun jumlah peserta perempuan secara relatif tidak mengalami kenaikan yang berarti, tapi secara absolut terjadi kenaikan yang hampir mencapai 100%.

Intervensi yang dilakukan SMERU, dan kenyataan bahwa banyak orang berpendapat bahwa pertemuan tersebut penting, telah menambah jumlah peserta menjadi 54 orang. Walaupun secara presentase partisipasi perempuan tidak meningkat, namun jumlah total hampir dua kalinya.

Jika undangan peserta lokakarya tersebut seluruhnya diserahkan kepada panitia pelaksana lokakarya yang sebagian besar laki-laki, maka jumlah peserta perempuan tidak akan meningkat dari 5 ke 9. Meskipun demikian, bukan berarti kami bisa menepuk dada. Apa yang bisa dibanggakan, kalau dari 54 peserta lokakarya hanya ada 9 perempuan yang hadir? Dan mereka pun tidak menunjukkan partisipasi penuh. Selama pertemuan tanggal 13 Mei, peserta mengusulkan seorang mahasiswi menjadi salah satu calon dari 4 calon untuk memimpin. Tetapi pencalonan ini hanya sia-sia, karena ternyata ia tidak mendapatkan satu suarapun. Meskipun demikian, ia kemudian dipilih menjadi sekretaris forum, dan secara aktif terus memberikan kontribusi. Contoh ini mencerminkan perlunya membuat kuota peserta perempuan dalam proyek pengembangan komunitas. Beberapa aturan telah diterapkan pada program lainnya termasuk Program Pengembangan Kecamatan. ■ DJ, AI

Krisis dan Buruh Pabrik: Dampak dan Masalah 'Jender'

The Crisis and Factory Workers: Some Gender Issues

AKATIGA: Indrasari Tjandraningsih

Over the past twelve months a number of organisations have been busy collecting and collating quantitative and qualitative data about the social impact of the economic crisis. One such body, The Bandung-based research unit AKATIGA, set out late last year to look specifically at the impact of the crisis on female factory workers. We include here a summary of their findings.

This article summarizes the major findings of a report into the impact of the crisis on factory workers, especially related to issues concerning gender. The investigation was carried out between October and December 1998 in areas where there is a high concentration of female workers in four provinces: West Java (Bogor, Tangerang, Bekasi), DKI Jakarta, East Java (Surabaya and Sidoarjo) and South Sulawesi. The study concentrated upon the specific impact of the crisis on female workers in comparison to male workers.

One of the objectives of the research was to examine the impact of the strategies adopted by companies in dealing with the crisis, especially their impact on working conditions, job opportunities and the welfare of female and male workers. Information was compiled through primary surveys, in-depth interviews and participatory exercises.

Major findings relevant to women:

- Female workers tend to be more passive and accepting of company rationalization measures: reduction of working hours, obligatory "home leave" (merumahkan), and mass lay-offs. Any cases of resistance are usually initiated by male workers.
- Companies tend to recruit young female workers to replace old female workers and male workers. This strategy, although seemingly inconsistent from the perspective of efforts to increase efficiency, can be explained by the nature of the work in those industries with a majority of female workers, where the work is very specific, simple and repetitive and can be immediately mastered without the need for extensive training. As

Lebih dari dua belas bulan yang lalu, beberapa organisasi sibuk mengumpulkan dan menyusun data kuantitatif dan kualitatif seputar dampak sosial dari krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Satu organisasi tersebut, Unit AKATIGA yang berlokasi di Bandung, dibentuk akhir tahun lalu untuk memperhatikan secara khusus dampak krisis terhadap buruh pabrik perempuan. Di sini kami juga memasukkan ringkasan singkat penemuan-penemuan mereka.

Tulisan ini merupakan ringkasan temuan utama dari laporan mengenai dampak krisis terhadap buruh pabrik, khususnya yang berkaitan dengan masalah 'jender'. Investigasi dilakukan pada bulan Oktober-Desember 1998, di wilayah di mana terdapat konsentrasi buruh perempuan di empat propinsi, yaitu Jawa Barat (Bogor, Tangerang, Bekasi), DKI Jakarta, Jawa Timur (Surabaya dan Sidoarjo) dan Sulawesi Selatan. Penekanan studi ini diletakkan pada aspek dampak krisis yang spesifik terhadap buruh perempuan dan perbandingannya dengan buruh laki-laki.

Satu di antara beberapa tujuan penelitian adalah menyoroti pengaruh strategi perusahaan dalam menghadapi krisis khususnya pengaruh terhadap kondisi kerja, peluang kerja dan kesejahteraan buruh perempuan dan laki-laki. Pengumpulan data dilakukan dengan survei primer, wawancara mendalam dan penerapan partisipatif.

Temuan utama yang mengait erat dengan perempuan antara lain:

- Buruh perempuan cenderung lebih pasif dan menerima keputusan perusahaan berkaitan dengan rasionalisasi: mengurangi waktu kerja, merumahkan buruh dan mem-PHK secara besar-besaran. Sedangkan kasus perlawanan umumnya dimotori oleh buruh laki-laki.
- Perusahaan cenderung merekrut buruh perempuan muda belia untuk mengganti buruh perempuan yang sudah tua dan buruh laki-laki. Strategi ini, sekalipun terkesan tidak konsisten dari sisi upaya peningkatan efisiensi, dapat dijelaskan dari sifat dan karakteristik pekerjaan di industri yang

this work is categorized as unskilled, wages need not be high, and women (with the myth of "having nimble fingers") are considered the most appropriate labor source to perform this work.

- One of the consequences of the tendency to prefer young female workers has been reduced job opportunity for women with families in the formal sector. In addition, women in this group have been forced into informal sector activities both in industry and services. These informal sector economic activities, for instance petty trading and domestic servants, are marginal from the perspective of protection and income levels.
- The shift in status from formal to more informal working relationships occurs in two other ways: casualisation and moving work from the factory to the worker's own home (outwork).

For example, a frozen fish company in South Sulawesi in response to the crisis has recruited new female workers on a contract basis. Under this system the company is only obliged to employ women when work is available. This system is considered to be the most appropriate for those industries with a majority of female workers since it releases companies from their obligation to pay monthly menstruation leave, maternity leave, health benefits, as well as paid annual holidays.

Another strategy carried out by some companies in coping with the crisis is to transfer part of the production process outside the factory. Female workers with families are offered the choice of taking their work home and delivering the final product, under a piece work system (borongan). For a section of the workforce, this is considered advantageous since work can be carried out while doing household chores. However, to earn higher wages they have to spend longer working hours because they are combining this with their domestic responsibilities. This casualisation of the workforce is a profitable strategy for companies because it reduces production costs, even though measures must be put in place to guarantee quality control. This strategy is also preferred because it reduces worker solidarity and organized opposition among workers and makes it more difficult for workers to pursue collective bargaining strategies.

- Although those companies that have benefited from the crisis as well as those companies that have been able to survive have increased average wages by 16% in accordance with the increase in minimum wages, the gap between income and expenditure has increased. One vital and interesting discovery is that compared to male workers, more female workers use their income to support the needs of their family in their places of origin, especially for food and

mayoritas buruhnya perempuan, di mana pekerjaannya sangat spesifik, sederhana dan repetitif, yang dapat segera dikuasai tanpa membutuhkan pelatihan secara mendalam. Sebagai pekerjaan yang dikategorikan tidak membutuhkan keterampilan, maka upah yang diberikan tidak perlu tinggi dan perempuan (dengan mitos 'jari jemarnya yang halus') merupakan tenaga yang sangat tepat untuk melakukannya.

- Salah satu konsekuensi adanya kecenderungan memilih buruh perempuan muda adalah menyempitnya kesempatan kerja bagi perempuan berkeluarga di sektor formal. Sebagai tambahan, perempuan kelompok ini dipaksa beralih ke sektor informal baik di sektor industri maupun jasa. Kegiatan ekonomi pada sektor informal, misalnya berdagang kecil-kecilan dan menjadi pembantu rumah tangga, adalah rentan dari sisi perlindungan dan tingkat penghasilan.

- Perubahan status hubungan kerja dari hubungan kerja formal menjadi hubungan kerja yang lebih informal terdapat dalam dua bentuk: kasualisasi dan memindahkan pekerjaan dari pabrik ke rumah buruh. Sebagai contoh, pembekuan ikan di Sulawesi Selatan, misalnya, dalam rangka merespon dampak krisis telah merekrut buruh-buruh perempuan baru dengan status kontrak. Dengan sistem ini perusahaan hanya mempunyai kewajiban kepada buruh ketika ada pekerjaan. Sistem ini menjadi sangat tepat untuk industri yang mayoritas buruhnya perempuan karena membebaskan perusahaan dari keharusan membayar berbagai kewajiban seperti cuti haid, cuti melahirkan, biaya kesehatan maupun libur tahunan.

Strategi lain yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam menghadapi krisis adalah memindahkan sebagian proses pekerjaan keluar dari pabrik. Buruh-buruh perempuan yang telah berkeluarga diberi pilihan oleh perusahaan untuk membawa pekerjaan ke rumah dan menyerahkan kembali hasil kerja yang telah diselesaikan, dengan sistem borongan. Bagi sebagian buruh, model produksi seperti ini dianggap menguntungkan karena dapat dilakukan sambil mengurus rumah tangga. Walaupun untuk dapat menghasilkan upah yang lebih banyak, mereka harus mencurahkan waktu bekerja lebih panjang karena mereka juga memiliki tanggungjawab untuk menunaikan kewajiban-kewajiban rumah tangganya. Strategi ini merupakan strategi yang menguntungkan bagi perusahaan karena mengurangi biaya produksi, walaupun perlu diterapkan peraturan untuk menjaga kualitas. Strategi ini juga disukai perusahaan karena mengurangi tekanan solidaritas dan perlawanan buruh, serta menghindari strategi tuntutan massal.

- Meskipun perusahaan yang mengalami

education. Among the female workers themselves, there are more single workers who contribute their wages to the family compared to married female workers, also mainly to meet food and education needs. This reflects the significant contribution of female workers to the on-going survival of their families.

- Men and women respond differently to the experience of retrenchment. Male workers who are retrenched, especially those already married with families, immediately look for alternatives by trying in the informal sector, mainly in services and trade. On the other hand, female workers who have been retrenched and who are still single continue to look for work in factories while depending on their severance pay or support from their families.
- For married women who have been laid-off, the decline in welfare is readily apparent. All expenditures must be reduced or eliminated. Food remains a priority. Various strategies have been adopted, including the following: borrowing from small shops to purchase essentials; selling/pawning of assets, using children's savings; depending on contributions from relatives; depending on the husband's income; trying petty trade - usually selling food; or working as a domestic servant. One other strategy is to mobilize other members of the family, especially children, to seek additional income.

dampak positif akibat krisis ataupun perusahaan yang mampu bertahan telah memberikan peningkatan upah rata-rata 16% sesuai dengan ketetapan kenaikan UMR, kesenjangan antara penghasilan dan pengeluaran masih saja besar. Salah satu temuan yang sangat penting dan menarik adalah bahwa dibandingkan buruh laki-laki, lebih banyak buruh perempuan yang mengalokasikan penghasilannya untuk membiayai kebutuhan keluarga di tempat asal, terutama untuk makan dan pendidikan. Di antara buruh perempuan sendiri, buruh perempuan lajang lebih banyak mengalokasikan penghasilannya kepada keluarga dibandingkan perempuan menikah, juga terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan. Hal ini mencerminkan kontribusi buruh perempuan yang nyata terhadap kelangsungan hidup keluarganya.

- Perempuan dan laki-laki memiliki respon yang berbeda terhadap PHK yang mereka alami. Buruh PHK laki-laki, terutama yang telah berkeluarga segera mencari alternatif dengan berusaha di sektor informal, terutama jasa dan perdagangan. Sebaliknya buruh PHK perempuan terutama yang lajang masih tetap berusaha mencari pekerjaan di pabrik sambil mengandalkan hidupnya pada uang pesangon atau bantuan keluarga.
- Bagi buruh PHK perempuan yang berkeluarga, kecenderungan penurunan kesejahteraan jauh lebih nyata. Semua pengeluaran harus ditekan dan beberapa pengeluaran lain harus dihilangkan. Prioritas pengeluaran tetap untuk makan. Berbagai strategi yang dilakukan diantaranya: berhutang ke warung, menjual/menggadaikan barang, menggunakan tabungan anak, mengandalkan sumbangan keluarga, mengandalkan penghasilan suami, mencoba berdagang kecil-kecilan - biasanya berjualan makanan - atau menjadi pembantu rumah tangga. Strategi lain adalah mengerahkan anggota keluarga, khususnya anak-anak, untuk mencari penghasilan tambahan.

Studi Terbaru SMERU: Suatu Pandangan yang Berbeda

Recent SMERU Study: A Different Perspective

Recently the SMERU team has completed a study of the impact of the crisis on blue collar workers and their families in four key industries: automotive assembling and spare parts, footwear, textiles, and construction. Some of the findings from this study will appear in coming editions of the newsletter. However, several of the findings relevant to women which offer a different perspective are included here:

- within a given industry, for women and men working in the same or similar jobs, there is no evidence that women receive wages that are substantially lower than men. Wages appear to be based more on the level of responsibility, length of employment and skill levels.
- between 70% and 80% of the jobs in the footwear and textile industries are occupied by women; they dominate these industries not because men are not prepared to accept low-paying employment, but because women are believed by management to possess the appropriate skills, are more painstaking and are less likely to cause trouble for factory management.
- the SMERU Team was surprised to find that some women interviewed - especially those who are not highly motivated - express the view that they now feel freed from the pressure of having to work. Those women who do not regard themselves to be the main bread-winners of the family, are enjoying being at home with their children and watching them develop. For example, of 28 women retrenched from the footwear industry interviewed by SMERU recently, eleven women have chosen not to look for alternative employment. The decline in the real value of factory wages may be a contributing factor.
- nevertheless, there is also strong evidence that the wives of some men who have been affected by the crisis and who have returned to their villages (generally in the construction industry) have been willing to assume the role as the family's main bread winner by travelling to the cities in search of work or even by registering for work overseas under the Indonesian Labour Force (TKI) scheme: it is readily apparent that women (including wives, mothers and mothers-in-law) are playing a crucial role in enabling families to cope with this crisis.

Baru-baru ini Tim SMERU melakukan pengamatan terhadap kondisi pekerja tingkat terbawah yang terkena dampak krisis dan keluarganya pada empat industri utama yaitu otomotif, persepatuan, tekstil, dan konstruksi. Temuan menyeluruh terhadap hasil studi ini akan dituangkan pada edisi-edisi mendatang. Namun beberapa temuan awal yang berkaitan dengan perempuan dan merupakan pandangan yang agak berbeda tersebut sengaja ditampilkan pada edisi khusus jender ini. Temuan tersebut antara lain:

- dalam suatu industri, untuk perempuan dan laki-laki dengan jenis pekerjaan yang sama atau sejenis, tidak ada indikasi bahwa perempuan memperoleh upah yang lebih rendah dari laki-laki. Upah lebih didasarkan pada tingkatan tanggung jawab, masa kerja, dan tingkat keahlian.
- antara 70% hingga 80% pekerjaan di industri persepatuan dan tekstil didominasi perempuan; mereka dipilih bukan karena laki-laki tidak tertarik bekerja pada industri dengan upah rendah ini, tetapi lebih kepada kenyataan bahwa perempuan lebih teliti, rapi, dan tidak mudah berontak.
- tim SMERU terkejut ketika menemukan bahwa sebagian pekerja perempuan yang ditemui - khususnya yang tidak memiliki motivasi yang tinggi - menyatakan pandangannya bahwa mereka sekarang terbebas dari tekanan keharusan untuk bekerja. Para pekerja ini umumnya menilai diri sendiri bahwa mereka bukanlah pencari nafkah utama, dan lebih menikmati mendampingi anaknya tumbuh. Sebagai contoh, dari 28 pekerja perempuan industri persepatuan yang terkena dampak krisis yang diwawancarai tim SMERU baru-baru ini, 11 diantaranya memilih untuk tidak mencari pekerjaan lain. Penurunan nilai upah riil mungkin merupakan satu faktor penyebab.
- walau demikian, terdapat indikasi para istri yang suaminya terkena dampak krisis dan pulang ke desa (umumnya para pekerja industri konstruksi) telah dengan rela mengambil alih peran suami untuk mencari nafkah utama dengan merantau ke kota mencari pekerjaan atau bahkan menjadi TKI; Tidak dapat dipungkiri peran perempuan (termasuk istri, ibu dan mertua wanita) sangat besar dalam mengatasi krisis. ■ Tim Dampak Krisis SMERU

Dimensi 'Jender' dalam Krisis: Fakta dari Survei Kehidupan Keluarga Indonesia

Gender Dimensions of the Crisis: Evidence from the Indonesian Family Life Survey

Elizabeth Frankenberg, Duncan Thomas and Kathleen Beegle

Few Indonesians have remained untouched by the crisis of the last two years. The effects of the crisis vary by region, across socio-economic groups, and across demographic groups. In particular, there may be important and complex gender-differentiated impacts. Results from the Indonesia Family Life Survey (IFLS) suggest that there are important and significant differences in impacts and responses to the crisis by gender. These results suggest the importance of further research focusing on the gender dimensions of the crisis in the immediate term as well as the longer-run implications of these impacts.

The Indonesia Family Life Survey (IFLS) is an ongoing longitudinal survey of individuals, households, families, and communities in Indonesia. The first wave was conducted in August-December, 1993, and the second wave in August-February 1997/8. In an effort to respond to the needs of the policy and scientific communities, a special wave of the IFLS, IFLS2+, was undertaken in late 1998. The IFLS2+ reinterviewed individuals from 2,000 households that had been interviewed one year earlier as part of IFLS2. The panel design of the IFLS allows the comparison of responses in the 1997 interview with the same person's (or household's) situation in 1998.

Education

Preliminary results of the impact on educational attainment tell a complex story. For both primary and secondary school aged children, enrollment rates have declined and dropout rates have increased. Children from poorer households have been hardest hit with respect to schooling. These patterns hold for boys and girls. Whereas in 1997 per capita expenditure levels were not a barrier to school attendance, by 1998 they matter. Although scholarships and fee waivers for poor children could serve to make schooling less costly, the IFLS data does not suggest that that was happening in the initial months of the 1998 school year.

The results for dropout and enrollment rates suggest that the schooling of boys and girls have not been differentially impacted. But, changes in the share of the budget allocated to schooling add to the story. Specifically, among poor urban households, there is a suggestion that young men (15-19) have been protected from the more severe cuts in education

Sebagian kecil dari bangsa Indonesia tetap tidak terjamah oleh krisis yang berlangsung selama dua tahun terakhir. Pengaruh krisis berbeda menurut daerah, kelompok sosio-ekonomi, dan kelompok demografis. Lebih jelasnya, terdapat kemungkinan dampak-dampak perbedaan 'jender' yang penting dan kompleks. Hasil-hasil dari Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS) memberi kesan bahwa dampak dan tanggapan krisis terhadap 'jender' berbeda nyata. Hasil survei ini menyarankan pentingnya penelitian lebih lanjut yang menekankan pada dimensi 'jender' sebagai akibat langsung dari krisis maupun implikasi jangka panjang dari dampak tersebut.

Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS) adalah sebuah survei secara longitudinal yang berkesinambungan terhadap individu, rumah tangga, keluarga, dan komunitas di Indonesia. Tahap pertama telah dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Desember 1993, dan gelombang kedua telah dilaksanakan pada bulan Agustus 1997 hingga Februari 1998. Dalam upaya memenuhi kebutuhan kebijaksanaan dan kesamaan ilmiah, tahapan khusus IFLS, yaitu IFLS2+, telah dilaksanakan menjelang akhir tahun 1998. Pada pelaksanaan IFLS2+ telah dilakukan wawancara ulang terhadap 2,000 rumah tangga yang telah diwawancarai tahun sebelumnya, yaitu pada saat pelaksanaan IFLS2. Bentuk survei IFLS2+ telah dirancang sedemikian rupa sehingga respon atas wawancara yang telah dilaksanakan pada tahun 1997 dapat dibandingkan dengan individu (ataupun rumah tangga) yang sama pada kondisi tahun 1998.

Pendidikan

Hasil awal dampak terhadap pendidikan memberi gambaran yang kompleks. Bagi anak-anak usia pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, jumlah yang mendaftar masuk mengalami penurunan, dan sebaliknya jumlah yang putus sekolah justru mengalami peningkatan. Anak-anak yang datang dari keluarga miskin paling terkena dampak terhadap pendidikan. Pola tersebut berlaku baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Bahwa tingkat pembelanjaan per kapita pada tahun 1997 bukan merupakan alasan untuk tidak mengikuti sekolah, akan tetapi pada tahun 1998 hal tersebut ternyata merupakan alasan untuk tidak meneruskan sekolah. Walaupun pemberian bea siswa dan

spending relative to their sisters and, especially, their younger siblings (ages 10-14). Thus, while we don't see differences in extensive measures of human capital investment, like school enrollment, more intensive measures, such as amount of funds allocated, reveal gender differences that suggest girls are at a disadvantage.

Employment

For men, in terms of overall levels of employment, about the same fraction of men were working at the time of the 1998 interview as were working in 1997. However, a larger fraction of younger men are working, while a smaller fraction of older men are working in 1998 relative to 1997. Findings from the IFLS indicate that women across all age and education groups are more likely to work in 1998 than in 1997. In the aggregate, the increase in portion working reflects largely an entrance of self-employed/unpaid family workers. One interpretation of the evidence is that women have entered the labor force in an effort to shore up family income in the face of very substantial real wage and income declines for the average family.

Household expenditure and income

These responses to the crisis are reflected in household incomes and expenditures. Decreases in expenditure tend to be smaller for households with relatively more females in 1997, suggesting that they contribute important resources to households. This result is also reflected in poverty transitions. In the IFLS, controlling for other characteristics, households with more women between the ages of 15-24 were more likely to exit and less likely to enter poverty between 1997 and 1998.

Impact of the crisis: into the future

The IFLS offers an array of information about how Indonesians are responding to the crisis and suggests that some of the differences have potentially important gender dimensions. These results also suggest that medium and long-run effects of the crisis may be quite different from the immediate impacts. Implications for well-being of the next generation will depend on the magnitude and persistence of the short-run impacts. For example, cutting back on investments in human capital of young children and young women may mean that these groups will carry the burden for the rest of their lives.

pembebasan biaya sekolah bagi anak-anak miskin dapat menurunkan biaya sekolah, akan tetapi menurut data yang diperoleh IFLS, hal tersebut tidak banyak membantu pada permulaan tahun ajaran 1998.

Tingkat anak putus sekolah dan anak yang mendaftar sekolah menggambarkan tidak adanya perbedaan dampak terhadap pendidikan anak laki-laki maupun anak perempuan. Akan tetapi, perubahan yang terjadi pada bagian pembelanjaan yang dialokasikan bagi pendidikan memberikan kejelasan. Khusus pada keluarga miskin, laki-laki usia muda (15-19 tahun) relatif mendapat perlindungan atas pengurangan biaya pendidikan dibandingkan dengan adik perempuannya, terutama yang masih berusia lebih muda (10-14 tahun). Dengan demikian, walaupun tidak ditemukan perbedaan dalam tindakan yang berpengaruh luas pada investasi sumber daya manusia, seperti jumlah yang mendaftar sekolah, namun tindakan yang berpengaruh luas, misalnya alokasi dana, menunjukkan adanya perbedaan terhadap 'jender' yang memberi kesan bahwa anak perempuan dirugikan.

Pekerjaan

Bagi anak laki-laki, pada seluruh tingkat pekerjaan, jumlah laki-laki yang memiliki pekerjaan saat dilakukan wawancara pada tahun 1998 kurang lebih sama dengan jumlah yang bekerja pada tahun 1997. Akan tetapi, banyak laki-laki berusia muda, sementara hanya sebagian kecil laki-laki berusia lanjut yang bekerja di tahun 1998 dibandingkan dengan tahun 1997. Temuan yang diperoleh IFLS menunjukkan bahwa jumlah wanita, baik dari segi umur dan kelompok pendidikan, lebih banyak bekerja pada tahun 1998 dibandingkan dengan tahun 1997. Secara keseluruhan, peningkatan jumlah yang bekerja tersebut menggambarkan banyaknya orang yang melakukan usaha sendiri/tenaga kerja keluarga yang tidak diupah. Salah satu bukti tersebut adalah bahwa kaum wanita bergabung dengan tenaga kerja yang ada dalam usaha untuk menopang upah riil dan pendapatan keluarga yang telah mengalami penurunan sangat berarti bagi kebanyakan keluarga.

Pendapatan dan belanja rumah tangga

Reaksi-reaksi terhadap dampak krisis tersebut terlihat pada pendapatan dan belanja rumah tangga. Penurunan belanja condong lebih kecil pada rumah tangga dengan jumlah wanita yang lebih banyak pada tahun 1997, yang memperlihatkan bahwa mereka telah menyumbangkan sumber daya yang penting bagi rumah tangga. Hasil temuan ini juga tercermin dalam transisi kemiskinan. Di hasil IFLS, dengan memperhatikan karakteristik-karakteristik lainnya, rumah tangga dengan jumlah wanita lebih banyak berusia 15-24 tahun ternyata lebih besar kemungkinannya untuk keluar dari garis kemiskinan dan ternyata lebih kecil kemungkinannya untuk

menjadi miskin di antara tahun 1997 dan 1998.

Dampak dari krisis: Menjelang masa depan

Hasil dari IFLS menyediakan berbagai informasi mengenai bagaimana masyarakat Indonesia menanggapi krisis yang berlangsung dan menggambarkan ada beberapa perbedaan yang memiliki potensi dimensi 'jender' yang penting. Hasil-hasil tersebut juga memperlihatkan bahwa pengaruh jangka menengah dan jangka panjang dari krisis akan sangat berbeda dari dampak langsung yang terjadi. Implikasinya adalah bahwa kesejahteraan generasi masa depan akan bergantung dari besar dan berkelanjutannya dampak jangka pendek. Sebagai contoh, pembatasan pada penanaman sumber daya manusia pada anak-anak muda maupun perempuan dapat berarti bahwa kelompok-kelompok itu akan menanggung beban tersebut sepanjang hidup mereka.

The Indonesia Family Life Survey is a collaborative effort by RAND, Lembaga Demografi, and the UCLA. The data collection was funded by the National Institute on Aging, the National Institute for Child Health and Human Development, the Futures Group (the POLICY project), the Hewlett Foundation, the International Food Policy Research Institute, John Snow International (OMNI project), the United Nations Population Fund, the World Bank, and the World Health Organization. The findings outlined here are drawn from "The Real Costs of Indonesia's Economic Crisis: Preliminary Findings from the Indonesia Family Life Survey," written by Elizabeth Frankenberg, Duncan Thomas and Kathleen Beegle. This report and other information about the Indonesia Family Life Survey can be accessed at: www.rand.org/FLS/IFLS.

Survei Kehidupan Keluarga Indonesia merupakan usaha bersama, dilaksanakan oleh RAND, Lembaga Demografi, dan UCLA. Biaya pengumpulan dana diperoleh dari the National Institute on Aging, the National Institute for Child Health and Human Development, the Futures Group (the POLICY project), the Hewlett Foundation, the International Food Policy Research Institute, John Snow International (OMNI project), the United Nations Population Fund, the World Bank, dan the World Health Organization. Temuan yang dikemukakan di sini diambil dari "Kerugian Riil akibat Krisis Ekonomi Indonesia: Hasil Temuan Awal dari Survei Kehidupan Keluarga Indonesia" (The Real Cost of Indonesia's Economic Crisis: Preliminary Findings from the Indonesian Family Life Survey) yang ditulis oleh Elizabeth Frankenberg, Duncan Thomas dan Kathleen Beegle. Laporan ini maupun informasi lainnya mengenai Survei Kehidupan Keluarga Indonesia dapat ditemukan melalui www.rand.org/FLS/IFLS.